

Surat Edaran Dirjen Bimmas Islam Nomor Dj li 2 1 Pw 00

Buku ini meneliti bagaimana hubungan negara dan filantropi Islam dengan perhatian khusus terhadap undang-undang wakaf. Dengan temuan didalam Undang-undang wakaf, tidak ada upaya negara mengintervensi wakaf sehingga pengelolaan wakaf harus terpusat di tangan negara. Tidak ada bukti bahwa negara melalui Direktorat Kementerian Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencoba mengambil alih pengelolaan wakaf. Hal ini dibuktikan dengan mulai di rancangannya Undang-undang wakaf. Dalam pembahasan tidak ditemukan keinginan negara untuk menguasai pengelolaan wakaf, yang selama ini sudah berjalan di masyarakat sipil muslim. Adanya perdebatan dalam pembahasan lebih kepada perbedaan persepsi dalam hal pluralisme, apakah wakif harus seorang muslim atau tidak, serta boleh tidaknya peruntukan wakaf bagi non-muslim. Justru negara memberi ruang bagi masyarakat sipil, untuk mengembangkan wakaf yang selama ini memang berada di tangan masyarakat sipil muslim. Temuan ini sejalan atau mendukung pendapat Amelia fauzia dalam disertasinya yang berjudul Faith and the State: A History of Islamic Philantropy in Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa filantropi Islam telah menjadi wilayah perebutan dominasi antara negara dan civil society, meskipun dengan tingkatan yang fluktuatif. Asep Saepudin Jahar dalam "The Clash of Muslims and the State: Waqf and Zakat in post-Independence Indonesia". Yang menyimpulkan bahwa kedua bidang ini tetap menjadi tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan wakaf, Sehingga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pun masih belum mampu meningkatkan tujuan zakat dan wakaf itu sendiri.

Judul : Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat Penulis : Dr. Evan Hamzah Muchtar, S.E., M.E.Sy Dr. Irwan Maulana, Lc., M.Si M. Maulidi Alif Utama, M.Pd Abdul Wajid, S.H., M.E Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 144 Halaman No ISBN : 978-623-5687-57-5 Persoalan Pengelolaan Zakat saat ini relatif kompleks. Tidak hanya menyangkut aspek hablum minallah akan tetapi juga hablum minannas yang mana pengaturan, pengolaan, serta distribusi harus secara real dan tepat sasaran sehingga mampu menjadi problem solving untuk menuju pengolalan zakat Kota Tangerang menjadi lebih baik. Maka peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat harus dibuat agar semuanya terkendali dengan sistematis dan profesional. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan komitmen berbagai pihak terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat terutama DPRD Kota Tangerang yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah ini. Historical development of the Dept. of Religious Affairs.

zakat dan wakaf

Implikasi SKB 1969 dan PERBER 2006

Tabloid Reformata Edisi 61 Juni Minggu II 2007

majalah Islam

Penegakan syariat Islam di Indonesia

Badai Bahtera Rumah Tangga & Solusinya

Sejak Juni 2005, Ahmadiyah banyak menuai gempuran dan serangan fisik di berbagai tempat di Indonesia, beberapa markas besarnya dihancurkan massa. Kerasnya aksi serta reaksi yang muncul adalah karena kesalingtidakfahaman di antara berbagai aliran Islam yang ada, dan perasaan memperebutkan kelompok siapa yang paling benar. MUI juga menjatuhkan vonis Ahmadiyah sebagai aliran sesat, dan berada di luar Islam, walaupun faktanya mereka adalah kelompok yang bersyahadat, berpedoman pada kitab al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa perbedaan pandangan memang. Bahwa Ahmadiyah menyebutkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad, yang diklaim sebagai Mahdi dan 'Isa al-Mau'ud. Tentu pandangannya itu didasarkan pada keyakinan umum umat Islam tentang akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Bedanya, jika kelompok Islam lain sampai hari ini masih menunggu datangnya Nabi Isa menjelang hari Kiamat, yang akan menghancurkan kaum Nasrani dan Yahudi, sementara kelompok Ahmadiyah meyakini bahwa Nabi Isa sudah turun dalam bentuk fisik Mirza Ghulam Ahmad. Inilah pangkal penghakiman bahwa Ahmadiyah merupakan faham yang sesat pada segi terakhir ini. Buku ini, digali dari sarangnya langsung. Penulis yang adalah seorang nadhliyin (sama sekali bukan penganut Ahmadi), pernah diundang untuk melakukan studi penelitian di Kampus JAI di Bogor pada tahun 1994. Tentu banyak hal baru yang akan dapat diperoleh pembaca dari buku ini, tentang praktek keagamaan (fiqh), dan berbagai dimensi keagamaan, yang memang sangat berbeda dengan berbagai aliran dan organisasi besar Islam di Indonesia. Justru informasi yang digali dari kalangan Ahmadiyah sendiri ini akan menjadi berharga sebagai informasi mengenai seluk-beluk gerakan Ahmadiyah. Sehingga penilaian yang dilakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah, bukanlah penilaian yang "tanpa pengetahuan". Karena Islam merupakan "rumah besar" bagi berbagai penghuninya, yang tentu saja-terlepas dari salah dan benarnya sebagian sisi ajarannya menurut fihak lain-Gerakan Ahmadiyah termasuk sebagai penghuni rumah besar Islam tersebut. Tentu hasil akhir penilaian apakah Ahmadiyah sesat atau tidak, tergantung dan terserah kepada para pembaca, karena kewajiban penulis adalah menghadirkan fakta apa adanya.

Revolusi teknologi bukan hanya menghasilkanlompatanbesar pada peradaban manusia saat ini, melainkan juga membawa permasalahan baru dengan kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi umat Islam, kompleksitas tersebut menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental produk Idasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian ditransformasikan ke dalam kajian dan produk lebih kontemporer, sebagai upaya menghadirkan solusi hukum bagi permasalahan kontemporer, baik di bidang muamalat (ekonomi, keuangan) maupun di bidang ibadah. Buku ini mengantarkan fransformasi kajian hukum Islam Idasik tersebut kepada yang lebih modern dan aplikatif. Kajian meijjadi menarik karena di samping transformasi tersebut, buku ini juga menyirroti perkembangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Di antara tema utama dalam buku ini: hukum ekonomi syariah: perkembangan dan penerapannya di Indonesia; peradilan agama; prinsip syariah dalam hukum perkawinan: mutah, nikah siri, syiqaq, dan pelaksanaarmya di Indonesia; wasiat dan hibah serta wasiat wajibah; dan contoh kasus berupakajian implementasi hulcum Islam di Madura. É ----- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Diverse Islamic teachings and sects in Indonesia.

Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Intervensi negara terhadap agama

Studi Undang-undang Wakaf

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Direktori masjid

Dinamika hukum perjanjian perkawinan di Indonesia : kajian terhadap lembaga eksekutorial dan solusi permasalahannya

Buku ini merupakan kontribusi penulis dalam menghadirkan beragam masalah perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia. Di antara tema inti dalam buku ini antara lain: Problematika nikah fasid dan hubungannya dengan pembatalan nikah dalam pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Pengangkatan anak. Harta bersama. Hukum hibah. Wasiat. Hukum waris Islam-studi banding dengan syarat lama dan hukum positif modern. Paradigma baru hukum wakaf. Hukum sedekah. Pengaruh teori receptie dalam perkembangan hukum di Indonesia. Aneka permasalahan tersebut disajikan secara logis dan sistematis dengan memadukan teori dan praktik sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa, pencari keadilan, praktisi hukum, dan masyar akat pada umumnya.

Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Implementation of sharia in Indonesia; collected articles.

This book analyses the relation between state and religion in Indonesia, considering both the philosophical underpinning of government intervention on religious life but also cases and regulations related to religious affairs in Indonesia. Examining state regulation of religious affairs, it focuses on understanding its origin, history and consequences on citizens' religious life in modern Indonesia, arguing that while Indonesian constitutions have preserved religious freedom, they have also tended to construct wide-ranging discretionary powers in the government to control religious life and oversee religious freedom. Over more than four decades, Indonesian governments have constructed a variety of policies on religion based on constitutional legacies interpreted in the light of the norms and values of the existing religious majority group. A cutting edge examination of the tension between religious order and harmony on one hand, and protecting religious freedom for all on the other, this book offers a cutting edge study of how the history of regulating religion has been about the constant negotiation for the boundaries of authority between the state and the religious majority group.

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia

majalah Nahdlatul Ulama

Kumpulan Pemikiran dan Petunjuk Praktis Untuk Pencerahan Warga Gereja

Suara hidayatullah

Tinjauan Hukum Islam & Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Sejarah dan amal bakti Departemen Agama, Republik Indonesia

Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah seiring sejalan yakni sama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Selanjutnya sebuah catatan penting dan menarik saat ini bahwa mekanisme pengumpulan dana wakaf telah bergeser ke online, berbeda dengan metode fundraising (penggalangan dana) wakaf pada zaman dahulu yang dikenal door to door, antar jemput, hard cash representative, dan melalui transfer bank. Pola wakaf yang dahulunya kita kenal baku dan eksklusif pun sekarang mulai berubah. Sekarang ini telah berkembang model baru pengumpulan dana wakaf untuk kepentingan produktif melalui jalur pembelanjaan di situs-situs e-commerce terkemuka di Tanah Air. Misalnya Bukalapak (bukalapak.com) telah menghadirkan official site untuk Dompot Dhuafa dan ACT-Global Wakaf yang memudahkan dan memfasilitasi calon wakif untuk beribadah secara lebih mudah dan produktif. Skema baru fundraising tersebut tentu bukan tanpa kendala sama sekali, terutama jika meninjau status perusahaan dan manajemen e-commerce, mekanisme ikrar/akad wakaf, biaya administrasi transaksi, biaya alih dana, pajak pembelanjaan sebagaimana ketentuan pemerintah, sistem bunga kredit perbankan, arah investasi wakaf produktif, alokasi dan berikut pelaporannya terhadap wakif dan persoalan-persoalan yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas e-commerce tersebut. Untuk itu, melalui buku yang berjudul Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa yang ini di antaranya akan menguraikan hal tersebut secara komprehensif berikut pola penanganan dan penyelesaian sengketa wakaf yang saat ini banyak terjadi sengketa wakaf hampir merata di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Perkawinan di satu sisi mengandung dimensi ilahiyah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Di sisi lain, perkawinan juga mengandung dimensi ijtimaiyyah (kemasyarakatan). Aspek kemasyarakatan akan terlaksana dengan baik atau tertib, bila ada perangkatnya yang disebut pranata sosial. Salah satu pranata sosial adalah hukum. Dalam hal ini, negara perlu terlibat dalam membuat hukum. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban (order), keadilan (justice) dan kesejahteraan (welfare). Karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pembentukan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tidak lepas dari tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Islamic economic system and its application in Indonesia.

komunikasi pembangunan manusia seutuhnya

Amalbakti

Gema Departemen Agama

19 Covid- Pandemi dalam 19 Perspektif

Sistem ekonomi Islam

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Meski harus diakui bahwa perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Secara umum, perjanjian perkawinan mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan (suami-istri) akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar-keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai salah satu ikhtiar penulis, untuk memberikan informasi berkenaan dengan perjanjian perkawinan. Di dalamnya memuat materi yang didasarkan pada sumber hukum seperti keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka, buku ini penting untuk dibaca dan dimiliki sebagai salah satu referensi, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

Pada akhir-akhir ini dunia sedang mengalami sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid-19. Virus ini berasal dari Cina yang menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena penyebarannya yang begitu cepat ke berbagai kota dan daerah, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk SATGAS penanganan Covid-19 dan berbagai kota dan daerah, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk SATGAS penanganan covid-19 dan berbagai regulasi dalam rangka pengendalian penyebaran

virus di segala sektor. Salah satu sektor yang menjadi titik perhatian layanan nikah.

Kacamata Hukum; Analisa Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 PENULIS: Vika Zeny A., dkk. Editor: Darania Anisa, M.H. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-209-7 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Penyebaran virus SARS-coV-2 sebagai penyebab pandemi Covid-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan, termasuk Indonesia. Ada banyak kebijakan yang diambil pemerintah sebagai langkah strategis mengatasi masalah ini. Perlu ada penyesuaian yang harus dijalankan oleh masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. Dari semua kebijakan yang telah diterapkan di masyarakat menimbulkan berbagai tanggapan, baik pro maupun kontra. Sehingga melalui buku ini, para kontributor ingin berbagi terkait hasil analisa terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang telah diterapkan kepada masyarakat selama Pandemi Covid-19 ini. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Kacamata Hukum; Analisa Kebijakan Masa Pandemi Covid-19

Fiqh dan KHI

NIKAH PADA MASA COVID -19

Bahaya Islam Jama'ah, Lemkari, LDII

Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Ahmadiyah menodai Islam

Education in Christian schools in Indonesia; collection of articles.

On Lembaga Dakwah Islam Indonesia, an organization or sect said to practice wrong Islamic teachings in Indonesia; confessions of its former leaders.

Civitas akademika IAIN Parepare sangat mengapresiasi penerbitan buku ini. Bahwa di sela-sela kesibukan akademik dan non akademik yang harus dilakukan di rumah, para dosen masih sempat meluangkan waktu untuk menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Turut serta mengambil andil dalam pemutusan mata rantai Covid-19 bukan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara sosial seperti menghimpun dana bantuan, membagi-bagikan masker, dll, tetapi juga para dosen membuat karya tertulis dengan melihat pandemi ini dalam berbagai perspektif juga merupakan sebuah langkah besar sebagai upaya menangani wabah yang melanda dunia ini.

laporan

Himpunan peraturan perundang-undangan badan peradilan agama di Indonesia

studi konvergensi atas politik aliran keagamaan dan reposisi peradilan agama di Indonesia

Catatan Harian Sang Penghulu

Sabili

Peradilan agama di Indonesia

On culture, religion, and society in Indonesia; volume commemorating the 50th anniversary of Department of Anthropology, Udayana State University.

Perbedaan aturan dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan perkara yang sama, sering kali menimbulkan dualisme. Hal ini sering kali membuat masyarakat muslim menjadi bingung harus memilih atau menggunakan aturan yang mana. Terutama dalam persoalan-persoalan yang diangkat dalam buku ini. Yang banyak terjadi di tengah masyarakat muslim, antara lain: status pernikahan wanita hamil karena zina, status nasab anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil karena zina tersebut yang merupakan akibat hukum yang terjadi setelah pernikahan itu terjadi, dan status ucapan talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang : 1. Fiqh, perkembangannya, ciri-ciri dan sifatnya; 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pembentukan, dan eksistensinya 3. Perbedaan pendapat antara Fiqh dan KHI dalam ketiga permasalahan di atas; 4. Dampak yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat tersebut berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat muslim. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Fiqh dan KHI yang ternyata adalah sama-sama hasil daya nalar (ijtihad) manusia yang sifatnya relatif dan bukan absolut. Selain itu, pemaparan yang terperinci dalam perbedaan pendapat antara Fiqh dan KHI diharapkan juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam lagi sehingga dapat memilih pendapat mana yang lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam

On administration and procedure of Islamic court in Indonesia; collection of articles.

Politik Hukum

Aliran dan paham sesat di Indonesia

Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam

Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku

membaca ulang teks kebudayaan menuju transformasi diri dalam multikulturalisme

Hasil Lokakarya Inventarisasi, Penentuan Skala Prioritas dan Metodologi Penelitian Masalah-Masalah Bimbingan

Masyarakat Beragama

Controversion on Ahmadiyya, an Islamic fundamentalist organization banned in Indonesia, from an Indonesian Muslim perspective.

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahkamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional. Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah

sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politisi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.* Persembahkan penerbit Kencana (PrenadaMedia)**

On implementation of Indonesian laws and regulations in relationship with religions and state from Islamic viewpoint.

Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia

Profil unit pelaksana KB.

Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat

kumpulan fakta dan data

Kado Pernikahan & Panduan Pengantin Baru

Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya

“ Setelah sukses menulis buku berjudul “Badai Bahtera Rumah Tangga & Solusinya”, sekarang buku kedua karya Kang Ade berjudul “Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku”. Saya sangat mengapresiasi terbitnya buku ini. Dalam buku ini, Kang Ade -mantan penghulu yang berpengalaman dalam melayani pernikahan- mengulas seputar pernikahan dan upaya membangun keluarga bahagia. Saya berharap agar para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam dan dapat membangun keluarga bahagia dengan meneladani Keromantisan Keluarga Nabi SAW. “Bayti Jannati (Rumahku, Bagai Surga Bagiku)”, demikian sabda Nabi SAW . Pernikahan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan mengharap ridla-Nya. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan membangun rumah tangga dan mendidik anak dewasa ini semakin kompleks, selain kesiapan yang berupa materi, juga perlu kesiapan iman dan mental yang kuat. Karena itu, buku ini sangat penting dibaca oleh masyarakat, terutama oleh calon pengantin atau pengantin baru, praktisi perkawinan seperti penghulu, hakim, advokat dan tokoh agama.” -----Assoc.Prof.Dr.H.Fahmy Lukman, M.Hum, Dosen UNPAD dan Atase Kebudayaan & Pendidikan di KBRI Mesir dan Filipina (Th.2013-2017).

===== Ana uhibbuk ! I love You ! Aku Cinta padamu! Itu kalimat yang diucapkan oleh hampir semua orang Cinta pada lawan jenis, antara laki-laki dan perempuan Itu normal dan dapat mengantarkan kebahagiaan dan keindahan Tetapi keindahan dan kebahagiaan itu harus dapat ridla Tuhan Itu bisa didapat dengan pintu gerbang pernikahan Cinta dapat terwujud Nafsu seksual dapat tersalurkan Pahala terus mengalir deras Pintu surga terbuka lebar Itulah Indahnya Pernikahan ----- adesaroni-----

Bunga Rampai : CORONA Penulis : KKN Kelompok 40 Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-520-1 Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku bunga rampai ini merupakan sajian kecil yang disuguhkan oleh teman-teman kelompok 40, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT), Dari Rumah (DR) angkatan XI Universitas Islam Negeri (UIN), Walisongo Semarang. Buku ini merupakan kumpulan tulisan hasil refleksi teman-teman selama melaksanakan KKN. Tema-tema yang disuguhkan cukup menarik, dan beragam berdasarkan latar belakang daerah asal yang berbeda. Sebagai hasil refleksi, tulisan-tulisan itu terkesan singkat dan ringan, tapi tetap memberikan wacana pembuka yang berarti bagi penulisan tahap lanjut (berupa laporan akhir) melalui riset pengembangan yang lebih mendalam. Tulisan-tulisan tentang dampak pandemik Covid-19 terhadap berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi tema umum dalam bunga rampai ini. Seperti program vaksinasi dari pemerintah, sosialisasi kondisi normal-baru. Selain itu ada pula ulasan tentang peluang yang muncul selama pandemi yang dapat diambil misalnya dalam bidang UMKM. Kemudian ada juga tulisan yang menyoroti berbagai tantangan yang dialami selama pandemi, terutama dalam bidang pendidikan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Ahmadiyah & Pembajakan Al-qur'an

Religion and Regulation in Indonesia

Aula

pengakuan mantan gembong-gembong LDII, Ust. Bambang Irawan Hafiluddin, Ust. Debby Murti Nasution, Ust. Zaenal Arifin Aly, Ust. Hasyim Rifa'in, fatwa-fatwa ulama dan aneka kasus LDII.

Ikhlas beramal

Hukum Islam